



Kuota Pengolahan Minus 30 Ton/Hari

■ Pemkot Yogya Klaim Problem Limbah Makin Terkendali

YOGYA, TRIBUN - Penu-tupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sejak kisaran bulan Mei 2024 menyisakan beragam polemik bagi Kota Yogyakarta. Sampah-sampah yang sebelumnya dialokasikan penuh menuju TPA yang berlokasi di Kabupaten Bantul itu, kini mau tak mau harus dikelola secara mandiri.

Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Ahmad Haryoko, mengaku, sempat kelabakan menghadapi program desentralisasi yang diinisiasi oleh Pemda DIY tersebut.

Tumpukan limbah di depo atau tempat penampungan sementara praktis tidak terhindarkan, selama Unit Pengolahan Sampah (UPS) pengganti TPA Piyungan dioptimalkan Pemkot Yogyakarta. "Dengan adanya desentralisasi pengelolaan sampah di DIY, kami harus mengoptimalkan unit peng-

Dari keempat UPS itu, sekarang kekuatan pengolahan sampah kita sekitar 230 ton per hari. Memang belum tuntas, masih minus 30 ton, karena produksi sampah hariannya 260 ton.

olahan sampah sendiri," katanya, Senin (7/7).

Namun, ia memastikan, setelah satu tahun program desentralisasi berjalan, problem persampahan di Kota Yogyakarta relatif sudah semakin terkendali. Seiring optimalisasi UPS

yang bisa terealisasi, upaya pengosongan sampah yang sempat tertimbun di depo-depo pun berhasil dilakukan eksekutif.

"Sampah-sampah itu sekarang kita olah menjadi produk RDF (*Refuse Derived Fuel*), atau langsung ke proses pemusnahan lewat insinerator," ujarnya.

Keempat UPS tersebut, seluruhnya berada di dalam Kota Yogyakarta, meliputi UPS Nitikan, Kranon, dan Karangmiri dengan metode pengolahan RDF. Kemudian, satu lagi ada UPS Giwangan di sisi selatan Kota Pelajar, yang menggunakan skema pemusnahan sampah melalui dua mesin insinerator.

"Dari keempat UPS itu, sekarang kekuatan pengolahan sampah kita sekitar 230 ton per hari. Memang belum tuntas, masih minus 30 ton, karena produksi sampah hariannya 260 ton," ucap Haryoko.

Untuk menutupnya, timbunan sampah disimpan terlebih dahulu di armada-armada yang disiagakan di beberapa UPS, sebelum diolah atau dimusnahkan. Sehingga, sisa sampah harian yang belum terkelola tidak sampai menimbulkan gangguan limbah di depo-depo atau tempat penampungan sementara.

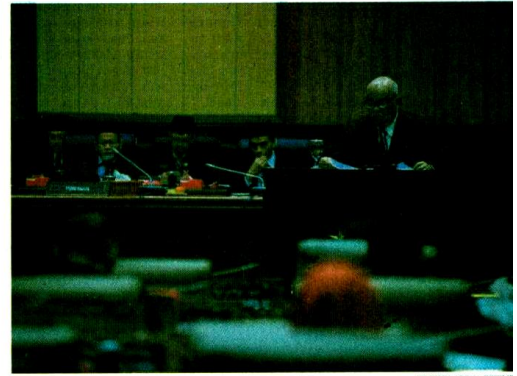
"Warga sekarang juga sudah bisa leluasa membuang sampahnya melalui penggerobak yang jemput bola ke lingkungannya. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk buang sembarangan," urainya.

Tidak kesulitan

Nurwanto, warga Keman-tren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, menyambut baik komitmen pemerintah dalam menanggulangi problem persampahan. Meski sempat melewati fase "darurat", masyarakat dewasa ini tidak lagi dibuat pusing, di mana aktivitas pembuangan dapat dilakukan dengan lancar.

"Kalau kemarin kan sempat repot, karena depo-depo penuh, kita sulit buang sampah. Sekarang setiap dua hari sekali sampah diambil sama penggerobak di rumah," tandasnya.

Ia pun tidak memper-masalahkan, ketika pemangku wilayah menetapkan tarif antara Rp20 ribu sampai Rp40 ribu per bulan untuk jasa penggerobak. Dengan akses yang lebih mudah, lingkungan tempat tinggalnya kini semakin bersih, karena tidak ada lagi yang sembarangan membuang limbah. (aka)



RAPAT PARIPURNA - Wakil Gubernur DIY, KGPA A Paku Alam X, menyampaikan jawab atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY dalam rapat paripurna yang membahas Rancangan Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta Senin (7/7). Berita selengkapnya simak di halaman 10.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005